

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PANAS BUMI DALAM PEMANFAATAN ENERGI PANAS
BUMI. STUDI KASUS: KONFLIK PEMANFAATAN ENERGI PANAS DI
KAWASAN DIENG, JAWA TENGAH**

MUHAMAD FATIH PRAGA ILHAQ

ABSTRAK

Peran regulasi tentang panas bumi sangat penting untuk menjadi landasan hukum dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Energi panas bumi adalah salah satu energi baru terbarukan yang perlu pemerintah dorong pemanfaatannya untuk merealisasikan target pemerintah dalam penggunaan energi bersih nasional. Namun permasalahan yang kerap kali muncul, kebijakan tentang panas bumi masih belum optimal dalam pencapaian target energi bersih nasional. Dalam proses perancangan kebijakan terdiri setidaknya mencakup identifikasi masalah, skala prioritas, alternatif kebijakan, penetapan, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini penulis fokus untuk melihat pada perancangan kebijakan tahapan kedua yaitu skala prioritas. Pada tahapan penentuan skala prioritas ini intensi pemerintah menjadi hal yang memiliki pengaruh tentang apa apa saja yang ingin pemerintah capai melalui regulasi tersebut. Sehingga, menurut penulis penafsiran dari intensi pemerintah menjadi hal penting untuk berkontribusi dalam evaluasi kedepannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data penelitian secara mendalam dan sumber data pada penelitian ini penulis ambil dari data primer maupun sekunder. Data primer penulis dapatkan dari wawancara langsung para pihak pemerintahan maupun pihak di luar pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Data sekunder penulis dapatkan dari publikasi tulisan pihak lain. Kemudian data-data penelitian tersebut penulis olah dengan menggunakan metode kualitatif untuk menafsirkan intensi pemerintah.

Kata Kunci: Panas Bumi, Energi Baru Terbarukan, Undang-Undang No 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

Muhammad Fatih Praga Ilhaq, 2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI DALAM PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI. Studi Kasus: Konflik Pemanfaatan Energi Panas di Kawasan Dieng, Jawa Tengah. 5

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

**IMPLEMENTAION OF LAW NUMBER 21 OF 2014 CONCERNING
GEOTHERMAL IN GEOTHERMAL CULTIVATION. CASE STUDY:
CIVILIAN CONFLICT IN GEOTHERMAL DIENG, MID JAVA.**

MUHAMAD FATIH PRAGA ILHAQ

ABSTRACT

The role of regulation on geothermal is very important to become a legal basis in encouraging the use of geothermal energy. Geothermal energy is one of the renewable energies that the government needs to encourage its use to realize the government's target in the use of national clean energy. However, the problem that often arises is that policies regarding geothermal are still not optimal in achieving the national clean energy target. The policy design process consists of at least the identification of problems, priority scale, policy alternatives, determination, and evaluation of policies. In this study, the authors focus on looking at the second stage of policy design, namely the priority scale. At this stage of determining the priority scale, the government's intention becomes something that has an influence on what the government wants to achieve through the regulation. Thus, according to the author, the interpretation of the government's intention is important to contribute to future evaluations. In this study, the authors used qualitative methods to analyze research data in depth and the data sources in this study were taken from primary and secondary data. The author's primary data was obtained from direct interviews with government parties and parties outside the government who have links with Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal. The author's secondary data is obtained from the publication of other parties' writings. Then the research data is processed by using qualitative methods to interpret the government's intentions.

Key Word: Geothermal, New Renewable Energy, Law No. 21 of 2014 concerning Geothermal.